



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

RENCANA KERJA 2025 BERDASARKAN RPJMD 2021-2026



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini serta diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Disadari bahwa hasil yang telah dicapai masih jauh dari harapan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, maka perlu upaya lebih keras dan terkoordinasi serta komitmen dari seluruh staf dan pimpinan untuk terus meningkatkan hasil yang telah dicapai.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan di masa yang akan datang.

Di ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2025.

Banjarbaru, 2025
Kepala Dinas,



MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU	8
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	10
C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	65
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	78
E. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	79
F. Penelaahan Usutan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	91
BAB III	93
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	93
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	93
B. TUJUAN DAN SASARAN	93
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	94
D. PROGAM DAN KEGIATAN.....	95
BAB IV.....	104
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	104
A. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS RKPD KOTA BANJARBARU	104
B. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	104
C. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	108
BAB V.....	123
PENUTUP	123
A. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	123
B. RENCANA TINDAK LANJUT	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang mendasar di Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Peningkatan dan Perluasan akses sarana transportasi bagi masyarakat sebagai moda arus orang, barang dan jasa mendukung perekonomian masyarakat. Disamping itu pula guna pengadaan infrastruktur sarana transportasi memegang peranan penting dari tahun ke tahun dimana Pembangunan Infrastruktur sangat diperlukan biaya, waktu yang begitu lama sehingga sebagai skala prioritas utama jangka panjang SKPD secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode I (pertama) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA Perubahan-SKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk itu perlu disusun Pedoman Penyusunan Renja Perubahan SKPD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sehingga diharapkan seluruh SKPD Kota Banjarbaru dapat menyusun Renja Perubahan SKPD dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel, dan tepat waktu.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014;
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru

19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan pada bidang urusan perhubungan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah:

- a. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
- b. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
- c. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan;
- d. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi Perencanaan pembangunan daerah antara Renja SKPD dengan RPJM Daerah Kota Banjarbaru.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari 5 (lima) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024-2025 Renja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang selanjutnya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang dicapai. Penilaian akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dihasilkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai mana diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dengan skala nilai peringkat kerja sebagai berikut :

Tabel II.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja*

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

*Ket : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel II.2.
Capaian Kinerja Tahun 2024 (Restra 2021-2026)

Sasaran	Kategori Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	A	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Angkutan Pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	53%	104%	208%	Sangat Baik
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas, Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Yang Memenuhi Standar	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	38%	39%	108%	Sangat Baik
	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	90%	121%	139%	Sangat Baik
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	90%	86%	101%	Sangat Baik
	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	Sangat Baik

Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30%	67%	223%	Sangat Baik
Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Baik

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Perhubungan memiliki 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran, dengan nilai capaian indikator kinerja sasaran berada pada nilai 92 s/d 100% dengan kategori capaian: “Sangat Baik” sebanyak 9 (sembilan) indikator.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Adapun rincian capaian kinerja atas 4 (empat) sasaran, terhadap 8 (delapan) Indikator Sasaran diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. SASARAN KE-1

- Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Uraian Indikator : Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pencapaian Sasaran Ke-1 yaitu : **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**, dengan indikator : **Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang antara lain disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengidentifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah terkait dengan pertanggungjawaban tersebut tentunya.

Dinas Perhubungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru berkewajiban menyusun dan menyampaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan sasaran ke-1 yaitu: **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** dengan indikatornya adalah: **Predikat**

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diperoleh dari penilaian pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan penilaian meliputi:

- Rencana strategis;
- Perjanjian kinerja;
- Pengukuran kinerja;
- Pengelolaan data kinerja;
- Pelaporan kinerja; dan
- Reviu serta evaluasi kinerja.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dihitung berdasarkan nilai realisasi predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dibagi target predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah kali 100%.

Realisasi predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah didasarkan kepada nilai tingkat akuntabilitas kinerja yang merupakan hasil evaluasi SAKIP SKPD dari Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 terhadap pelaksanaan SAKIP Dinas Perhubungan tahun 2023, dengan nilai tingkat akuntabilitas kinerja “A”, berdasarkan komponen yang dinilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Penilaian Sakip Dinas Perhubungan

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Perencanaan Kinerja	24,60
2	Pengukuran Kinerja	24,60
3	Pelaporan Kinerja	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,50
	Nilai Hasil Evaluasi	82,45
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	A

Sumber : Evaluasi SAKIP SKPD Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2022

Berdasarkan nilai hasil evaluasi sebesar 82,45 dengan nilai tingkat akuntabilitas kinerja adalah “A”, sementara target yang dibuat untuk predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan nilai “BB”, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel II. 4 Capaian Kinerja Penilaian SAKIP

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Katagori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	A	100%	Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebesar 100%. Hal ini berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Tinggi**.

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan capaian predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realiasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	CC 59,65	59,45%	A 82,45	100%	A 81,60	51,6%

Berdasarkan data perbandingan predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari beberapa tahun sebelumnya, terdapat peningkatan predikat akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dimana pada tahun 2024 memperoleh predikat “A” (81,60) sementara pada Tahun 2023 dengan predikat “A” (82,45) dan Tahun 2022 dengan predikat “CC” (59,65).

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Perbandingan capaian predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2023 dengan target Renstra, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 6 Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A	BB

Realisasi capaian indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan nilai “A” melebihi target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu nilai “B”.

d. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2023 dengan Standar Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 7 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A	BB

Realisasi capaian indikator kinerja predikat akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 diperoleh nilai “A” (Sangat Baik), capaian ini lebih tinggi dari standar nasional predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tercantum pada RPJMN Tahun 2020 - 2024 yaitu nilai “BB” (Baik).

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan capaian predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2024, dikarenakan adanya beberapa faktor sebagai berikut:

1. Rencana strategis yang sudah terintegrasi dengan perencanaan lainnya;
2. Sudah berjalannya pengukuran kinerja secara akurat dan terjadwal;

3. Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan reviu dan evaluasi kinerja dengan pihak terkait;
4. Terpenuhinya pegawai yang menangani penyusunan dokumen perencanaan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya; dan
5. Terlaksananya sistem evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Langkah yang diperlukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan terhadap kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dilakukan secara terus-menerus dengan melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1). Melakukan pengintegrasian dokumen rencana strategis dengan perencanaan lainnya, untuk mencegah perbedaan data antara dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan lainnya;
- 2). Melaksanakan pengukuran kinerja secara akurat dan terjadwal;
- 3). Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan reviu serta evaluasi kinerja dengan pihak terkait;
- 4). Melaksanakan menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi bidang perencanaan dan pelaporan program; dan
- 5). Menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara tepat guna dalam rangka meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel II. 8 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	23.644.825

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.280.000	71.007.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.240.259.950	4.163.477.639
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.999.900	29.544.950
Jumlah	4.375.539.850	4.287.675.014
Persentasi serapan anggaran		97,99%
Persentasi capaian kinerja		100%
Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja - Persentasi serapan anggaran)		2,01%

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 2,01%. Tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pergeseran anggaran, tahun yang akan datang akan dilakukan monitoring secara berkala atas serapan anggaran dan dilakukan refocusing bila terjadi sisa anggaran lebih.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. SASARAN KE-2

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Uraian Indikator : Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi

Pencapaian Sasaran Ke-2 yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, dengan indikator: **Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi** dijadikan sebagai sasaran oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa: Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Sesuai dengan Sasaran Ke-2 yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dengan indikatornya adalah: **Cakupan Pelayanan Internal yang Difasilitasi** diperoleh dari pelaksanaan, sebagai berikut:

- Terlaksananya pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan yang Berintegritas, Disiplin, Berkompeten, Profesional, Berkinerja Tinggi, dan Beretika;
- Terlaksananya pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan;
- Terlaksananya sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas;
- Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja cakupan pelayanan internal yang difasilitasi, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Indikator kinerja cakupan pelayanan internal yang difasilitasi dihitung berdasarkan nilai realisasi cakupan pelayanan internal yang difasilitasi dibagi target cakupan pelayanan internal yang difasilitasi kali 100%.

Nilai realisasi cakupan pelayanan internal yang difasilitasi didasarkan kepada pelaksanaan dari pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan, sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan, sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan serta sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel II. 9 Cakupan Pelayanan Internal

No	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan yang Berintegritas, Disiplin, Berkompeten, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.	86%	86%	100%
2.	Mewujudkan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	76%	76%	100%
3.	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas Kedinasan	75%	75%	100%
4.	Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	75%	75%	100%
5.	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	75%	75%	100%
Realisasi cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100%

Berdasarkan nilai realisasi cakupan pelayanan internal yang difasilitasi sebesar 100%, sementara target yang dibuat untuk cakupan pelayanan internal yang difasilitasi adalah sebesar 100%, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel II. 10 Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Internal

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Katagori Capaian
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
an Pelayanan Internal yang Difasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan internal yang difasilitasi adalah sebesar 100%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan cakupan pelayanan internal yang difasilitasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 11 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data perbandingan cakupan pelayanan internal yang difasilitasi dari beberapa tahun sebelumnya, diperoleh hasil bahwa dari Tahun 2023 sampai Tahun 2024 diperoleh realisasi dan capaian kinerja cakupan pelayanan internal yang difasilitasi memperoleh hasil 100%. Tentunya cakupan pelayanan internal yang difasilitasi dari tahun ke tahun terus dipertahankan dan tingkatkan agar pelayanan ini dapat terpenuhi, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra, sebagai berikut:

Tabel II. 12 Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan nilai “100%” dengan realisasi kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Renstra yaitu dengan nilai “100%”.

d. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2024 dengan Standar Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 13 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	-

Realisasi capaian indikator kinerja pada sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023 diperoleh nilai “100%”, sedangkan dari standar nasional tidak ditemukan.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan cakupan pelayanan internal yang difasilitasi tahun 2023, dikarenakan adanya beberapa faktor sebagai berikut:

- 1). Terlaksananya pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan yang Berintegritas, Disiplin, Berkompeten, Profesional, Berkinerja Tinggi, dan Beretika;
- 2). Terlaksananya pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan;
- 3). Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
- 4). Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- 5). Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

Langkah yang diperlukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan terhadap kinerja cakupan pelayanan internal yang difasilitasi, dilakukan melalui:

- 1). Melakukan perhitungan dan pengadaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh pegawai;

- 2). Melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap seluruh sarana dan prasarana kerja yang digunakan oleh pegawai;
- 3). Meningkatkan pelayanan keadministrasian kepegawaian secara cepat dan mudah berbasis teknologi;
- 4). Meningkatkan kemampuan pegawai melalui pendidikan, pelatihan maupun bimbingan sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai; dan
- 5). Meningkatkan kedisiplinan pegawai dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara ketat dan tepat guna dalam rangka meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel II. 14 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.250.000	13.225.500
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.250.000	13.225.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276.504.000	250.385.850
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	276.504.000	250.385.850
Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.712.400	478.923.595
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.872.400	35.677.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.134.000	200.962.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.900.000	39.206.750
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.998.000	1.995.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.808.000	201.081.145

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.814.072.000	1.596.168.975
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.846.000	140.918.975
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.306.000	468.700.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.135.000.000	972.100.000
Pengadaan Mebel	49.920.000	14.450.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.196.620	197.478.41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.800.000	129.137.047
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.396.620	68.341.366
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.063.300	525.112.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.991.000	21.867.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.052.300	253.040.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.940.000	31.340.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221.080.000	218.865.200
JUMLAH	3.733.798.320	3.061.295.133
Persentasi serapan anggaran		81,99%
Persentasi capaian kinerja		100%
Efisiensi anggaran		18,01%
(Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)		

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 18,01%. Tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pergeseran anggaran, tahun yang akan datang akan dilakukan monitoring secara berkala atas serapan anggaran dan dilakukan refocusing bila terjadi sisa anggaran lebih. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah.

3. SASARAN KE-3

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar
- Uraian Indikator : Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi

Pencapaian sasaran ke-3 yaitu: **“Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Angkutan Pelajar”**, dengan indikator: **Persentase Kebutuhan Angkutan Pelajar Transportasi Darat yang Terpenuhi**, penetapan indikator tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelajar dan Kesehatan, yang mendasari terhadap kebijakan penyediaan angkutan pelajar gratis, kebijakan tersebut dalam rangka mendukung program wajib belajar dan pelayanan Kesehatan di Kota Banjarbaru maka perlu menyediakan angkutan pelajar dan. Kesehatan dalam melakukan perjalanan ke sekolah dan fasilitas kesehatan, kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dibawah umum dan menekan biaya transportasi di Kota Banjarbaru bagi pelajar untuk ke sekolah dan masyarakat yang akan ke fasilitas kesehatan, perlu menyediakan angkutan gratis untuk pelajar dan masyarakat di Kota Banjarbaru, kegiatan angkutan pelajar gratis juga merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Banjarbaru dan menjadi salah satu indikator dari LKPJ.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dihitung berdasarkan nilai realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi yaitu jumlah pelajar yang terlayani angkutan pelajar dibagi jumlah pelajar yang memohon dikali 100%.

Berikut perhitungan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi:

Tabel II. 15 Data Angkutan Pelajar Gratis Tahun Ajaran 2023/2024

Rute	Jumlah Siswa Yang Minta Layani			Jumlah Mobil			Jumlah Total Mobil APG	Jumlah Siswa Yang Terlayani Saat ini		
	L	P	Total	Station Wagon	Micro Bus	Organda		APG	Organda	Total
SMP 3	117	98	215		1	8	9	28	179	207
SMP 5	33	29	62	5			5	63	0	63
SMP 6	32	28	60	3		2	5	35	28	63
SMP 8	50	43	93			6	6	0	84	84
SMP 9	41	33	74	3			3	71	0	71
SMP 10	30	38	68	1		3	4	22	46	68
SMP 11	62	80	142	7			7	142	0	142
SMP 12	13	9	22		1		1	22	0	22
SMP 13	43	43	86		1	3	4	33	42	75
SMP 14	63	51	114			6	6	0	128	128
SMP 15	50	29	79	4		2	6	60	25	85
MTs/MA Miftahul Khairiyah	43	85	128			3	3	0	182	182
MAN 1	9	28	37			3	3	0	37	37
SMA 3	5	4	9			1	1	0	10	10
Ponpes Sullamul Khairiyah	61	69	130			3	3	0	130	130
Ponpes Al-Bidayah	5	5	10	1			1	10	0	10
Angkutan Disabilitas	12	0	12	1			1	12		12
	669	672	1341	25	3	40	68	498	891	1389

Sumber : Hasil Survei Tim Seksi Angkutan dan Terminal Tahun 2022/2023

Dari tabel terlihat jumlah pelajar yang sudah terdata oleh Dinas

Perhubungan Kota Banjarbaru pada tahun 2023/2024.

Tabel II. 16 Jumlah Pelajar yang Memohon dan Terlayani

Uraian	Jumlah
(1)	(4)
jumlah pelajar yang terlayani	1.389 orang
jumlah pelajar yang memohon dilayani	1.341 orang

Berikut ini perhitungan nilai persentase dari kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah pelajar yang terlayani angkutan pelajar}}{\text{Jumlah pelajar yang memohon dilayani angkutan pelajar}} \times 100\%$$

$$= \frac{1389 \text{ orang}}{1341 \text{ orang}} \times 100\% = 104\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai realisasi kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi sebesar 104%, sementara target kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi sebesar 50%, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tabel II. 17 Persentase Kebutuhan Transportasi Pelajar

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Katagori Capaian
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
Kebutuhan Angkutan Pelajar Transportasi Darat yang Terpenuhi	50%	104%	208%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi adalah sebesar 208%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 18 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realiasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	32,3%	72%	32,2%	69%	104%	208%

Berdasarkan data perbandingan realisasi persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dari beberapa tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 104% sementara pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 32,2%, dan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 32,3%, dapat dilihat bahwa antara tahun 2023 dengan 2022 memiliki realisasi yang hampir sama. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat lonjakan realisasi yang tinggi dikarenakan dilakukannya evaluasi dan penyesuaian terhadap aspek- aspek yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Perbandingan persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi tahun 2024 dengan target Renstra, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 19 Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	104%	50%

Realisasi capaian indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan perolehan nilai “104%” ini melebihi target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu dengan nilai “50%”.

d. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi tahun 2024 dengan Standar Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 20 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	104%	-

Realisasi capaian indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran ini dikarenakan adanya beberapa faktor sebagai berikut:

- 1). Sesuai dengan kebijakan kepala daerah terpilih, yang menyediakan angkutan pelajar gratis, menjadi tugas dari Dinas Perhubungan;
- 2). Adanya jalur yang memiliki jarak tempuh yang beragam tentunya diperlukan alat transportasi dalam jumlah yang banyak;
- 3). Keterbatasan jumlah armada angkutan pelajar gratis yang tersedia, sehingga angkutan pelajar gratis hanya mampu melayani pelajar pada tingkat SMP se-derajat, maka dari itu belum tersedianya angkutan pelajar gratis untuk pelajar tingkat SD dan beberapa sekolah SMP lainnya;
- 4). Armada yang digunakan merupakan mobil yang telah digunakan oleh pejabat terdahulu sehingga armada tersebut memerlukan pemeliharaan dan penggantian suku cadang yang sangat banyak.

Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru masih tetap melakukan peningkatan kinerja melalui:

- 1). Melaksanakan penyediaan armada baru melalui proses pengadaan secara bertahap;
- 2). Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penyediaan angkutan pelajar; dan
- 3). Melakukan pemeliharaan secara berkala sehingga armada tidak mengalami kerusakan yang lebih parah.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara ketat dan tepat guna dalam rangka meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel II. 21 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.650.105.400	4.053.036.650
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	39.993.500	0
Jumlah	5.690.098.900	4.053.036.650
Persentasi serapan anggaran		71,73%
Persentasi capaian kinerja		208%
Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)		136,27%

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 136,27%. Tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pergeseran anggaran, tahun yang akan datang akan dilakukan monitoring secara berkala atas serapan anggaran dan dilakukan refocusing bila terjadi sisa anggaran lebih.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

4. SASARAN KE-4 INDIKATOR KINERJA KE-1

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar
- Uraian Indikator : Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi

Pencapaian sasaran ke-4 indikator kinerja ke-1 yaitu: ***“Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar”***, dengan indikator: **Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi** terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang perhubungan sebagaimana di atur pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, diantaranya adalah program pengembangan angkutan umum massal perkotaan merupakan salah satu bagian kegiatan dari program prioritas pemerintah daerah, sebagai salah satu pengemban amanah penyediaan layanan transportasi yang aman dan nyaman terus berupaya memberikan layanan transportasi yang memadai dan menyesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang diperlukan masyarakat, berikut ini beberapa ketentuan yang terkait dengan penyediaan angkutan umum transportasi, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pentingnya penyediaan angkutan umum sesuai kebutuhan masyarakat agar kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu pentingnya kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan bidang perhubungan.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian masing indikator kinerja Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dihitung berdasarkan nilai realisasi kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi yaitu jumlah penumpang yang terlayani dalam setahun dibagi kapasitas armada dalam setahun kali 100%.

Berikut data operasional angkutan umum Kota Banjarbaru selama 1 tahun, sebagai berikut:

- Jumlah penumpang yang terlayani dalam setahun (berdasarkan surat permohonan peminjaman bus dalam setahun): 3.550 orang/tahun
- Kapasitas armada dalam setahun:
= jumlah armada bus x kapasitas bus x jumlah hari dalam setahun
= 9 unit x 28 seat x 365 hari
= 91.980 orang/tahun

Realisasi kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah penumpang yang terlayani dalam setahun}}{\text{Kapasitas armada dalam setahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Jumlah armada yang beroperasi dalam setahun} \times \text{Jumlah seat}}{\text{Jumlah armada} \times \text{Jumlah seat} \times \text{Jumlah hari armada beroperasi dalam setahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{198 \text{ kali beroperasi} \times 25 \text{ seat}}{9 \text{ unit} \times 25 \text{ seat} \times 57 \text{ hari dalam setahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{4.950}{12.825} \times 100\% \\
 &= 39\%
 \end{aligned}$$

Dari data tersebut terlihat nilai persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 22 Persentase Kebutuhan Transportasi Umum

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Katagori Capaian
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
Kebutuhan Angkutan Umum Transportasi Darat yang Terpenuhi	36%	39%	108%	angat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi adalah sebesar 108%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Berikut ini disajikan realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi selama tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 23 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realiasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	30%	94%	31%	91%	39%	108%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat realisasi persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi pada tahun 2024 sebesar 39%, sementara pada tahun 2023 sebesar 31% dan pada tahun 2022 sebesar 30%, terlihat adanya kenaikan penggunaan transportasi darat pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi saat ini yang semakin membaik dan meningkatnya aktivitas masyarakat.

Tentunya pemerintah daerah terus mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi masal yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah seperti “Banjar Bakula” dan angkutan pelajar gratis, sehingga mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Perbandingan Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi tahun 2024 dengan target Renstra, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 24 Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	39%	36%

Perbandingan realisasi capaian Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan nilai “39%” dengan realisasi kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Renstra yaitu dengan nilai “36%”.

d. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi tahun 2024 dengan Standar Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 25 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	39%	-

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023 diperoleh nilai “39%” , sedangkan dari standar nasional tidak ditemukan.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja sasaran: “Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi”, antara lain disebabkan oleh:

- 1). Masih belum terintegrasinya sistem layanan angkutan umum secara baik;
- 2). Belum optimalnya manajemen organisasi yang mewadahi para sopir dan pengusaha angkutan umum;
- 3). Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pembaharuan angkutan umum yang sudah tidak dapat dioperasikan secara layak; dan
- 4). Pendapatan para sopir angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan.

Langkah selanjutnya yang diperlukan dimasa yang akan datang, pada indikator sasaran: “persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi”, adalah sebagai berikut:

- 1). Mengupayakan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum atau angkutan massal sebagai transportasi publik, terutama untuk angkutan jarak dekat dan menengah;
- 2). Merekrut para sopir angkutan perkotaan untuk menjadi sopir pada mobil angkutan milik pemerintah daerah yang sedang dikembangkan;
- 3). Mengembangkan rute/trayek baru sesuai dengan penambahan kawasan pemukiman dan pusat kegiatan baru yang ada di Kota Banjarbaru; dan
- 4). Membangun kerjasama dengan organisasi/lembaga yang mewadahi para sopir angkutan umum dan pengusaha angkutan lainnya.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara ketat dan tepat guna dalam rangka pemenuhan kebutuhan angkutan umum transportasi darat. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel II. 26 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.690.098.900	4.053.036.650
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.650.105.400	4.053.036.650
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	39.993.500	0
Jumlah	5.690.098.900	4.053.036.650
Persentasi serapan anggaran		71,73%
Persentasi capaian kinerja		108%
Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)		36,27%

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka mewujudkan penyediaan kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi sebesar 36,27%. Tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pergeseran anggaran, tahun yang akan datang akan dilakukan monitoring secara berkala atas serapan anggaran dan dilakukan refocusing bila terjadi sisa anggaran lebih.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

5. SASARAN KE-4 INDIKATOR KINERJA KE-2

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar
- Uraian Indikator : Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan

Pencapaian sasaran ke-4 indikator kinerja ke-2 yaitu : ***“Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar”***, dengan indikator : **Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan**, penetapan indikator tersebut terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang

perhubungan termasuk didalamnya penyediaan sarana transportasi bagi mobilitas masyarakat, tentunya harus didukung oleh penyediaan sarana tempat pemberhentian untuk menurunkan maupun untuk menaikkan penumpang baik berupa terminal maupun bentuk lainnya seperti halte sehingga memudahkan penumpang untuk turun atau naik, halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan, sebagaimana diatur pada pedoman teknis ini juga mengatur tentang kelengkapan standar dari sebuah halte bus. Oleh karena itu pentingnya untuk penyediaan tempat- tempat pemberhentian bus (halte) untuk penyediaan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka penyediaan halte telah diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, dengan adanya pemenuhan standar penyediaan halte diharapkan terjadinya peningkatan masyarakat dalam menggunakan angkutan massal yang disediakan oleh pemerintah, sehingga mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan. Oleh karena itu pentingnya prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan bidang perhubungan.

Selanjutnya, dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan dihitung berdasarkan nilai realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan dibagi target prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan kali 100%.

Sampai dengan tahun 2023 terdapat 48 prasarana angkutan jalan yang terdiri atas 39 buah halte dan 9 buah parkir sepeda. Sedangkan, berdasarkan realisasi tahun 2024 terdapat pengadaan prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan yaitu 2 paket pekerjaan yang terdiri dari rehabilitasi halte dan pembangunan parkir sepeda. Sementara target persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan sampai dengan tahun 2026 sebanyak 42 buah, maka diperoleh perhitungan

realisasi indikator persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 27 Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Pelayanan

Indikator	Ekisting	Tahun 2023	Realisasi s/d 2024	Perkiraan s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	31 buah	39 buah	41 buah	42 buah
Halte	5 buah	9 buah	10 buah	
Parkir Sepeda				
Realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan ($51/42 \times 100\% = 121\%$)				

Sumber : Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi Tahun 2023

Dari data tersebut di atas selanjutnya dihitung nilai persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, rumusan sebagai berikut:

Tabel II. 28 Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prasarana Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Pelayanan	87%	121%	139%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan adalah sebesar 139%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian: **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Berikut ini disajikan realisasi persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan selama tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 29 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	CK	Realisasi	CK	Realisasi	CK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	92%	111%	114%	114%	121%	139%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan pada tahun 2024 sebesar 139%, untuk perbandingan kinerja 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023 sebesar 114% dan tahun 2022 sebesar 92%, dari capaian tersebut dapat dilihat kenaikan setiap tahunnya, hal ini tentunya ditunjang oleh kebijakan Kepala Daerah terkait dengan pembangunan halte untuk mendukung transportasi publik di Kota Banjarbaru.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Perbandingan Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan tahun 2023 dengan target Renstra, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 30 Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	121%	87%

Perbandingan realisasi capaian Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan nilai “121%” dengan realisasi kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Renstra yaitu dengan nilai “87%”.

d. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan tahun 2024 dengan Standar Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 31 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	121%	-

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun

2023 diperoleh nilai “121%” , sedangkan dari standar nasional tidak ditemukan.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja sasaran: “Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan”, antara lain disebabkan oleh:

- 1). Terbatasnya hasil kajian terkait kebutuhan halte berdasarkan jumlah naik turunnya penumpang yang dilaksanakan oleh Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
- 2). Terbatasnya ketersediaan lahan untuk penempatan dan pembangunan halte baru di sekitar rute yang dilalui;
- 3). Belum adanya bentuk desain halte dan sarana perhubungan lainnya yang khas, sesuai dengan karakteristik masyarakat Banjarbaru;
- 4). Masih terbatasnya angkutan pengumpan (*feeder*) yang tersedia bagi masyarakat Banjarbaru, sehingga terhambatnya mobilitas masyarakat saat menggunakan angkutan umum;
- 5). Adanya partisipasi masyarakat dalam penggunaan halte menjadi salah satu bentuk perubahan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan layanan angkutan umum.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator sasaran: “Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan”, adalah sebagai berikut:

- 1). Menaikkan dan menurunkan penumpang pada prasarana angkutan jalan yang telah disediakan sesuai kantong penumpang;
- 2). Membangun tempat-tempat pemberhentian seperti halte yang representatif, aman, nyaman, dan terjangkau;
- 3). Mensosialisasikan penggunaan prasarana angkutan jalan seperti terminal, halte, dan Tempat Pemberhentian Bus (TPB) kepada masyarakat dan membiasakan masyarakat untuk menggunakan prasarana tersebut;
- 4). Menyediakan sarana dan prasarana jalan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat; dan
- 5). Meningkatkan sosialisasi penggunaan angkutan umum kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjarbaru.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara ketat dan tepat guna dalam rangka penyediaan prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel II. 32 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	136.343.250	135.225.400
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	125.548.750	114.324.250
Jumlah	261.892.000	249.549.650
Persentase serapan anggaran		95,29%
Persentase capaian kinerja		139%
Efisiensi anggaran (Persentase capaian kinerja- Persentase serapan anggaran)		43,71%

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka penyediaan prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan sebesar 43,71%.

Tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pergeseran anggaran, tahun yang akan datang akan dilakukan monitoring secara berkala atas serapan anggaran dan dilakukan refocusing bila terjadi sisa anggaran lebih.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

6. SASARAN KE-4 INDIKATOR KINERJA KE-3

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar
- Uraian Indikator : Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ

Pencapaian sasaran ke-4 indikator kinerja ke-3 yaitu: **“Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar”**, dengan indikator: **Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ**, penetapan indikator tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa:

- a. Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan;
- b. Perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan.

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), penerangan jalan umum (PJU), alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ dihitung berdasarkan nilai realisasi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ dibagi target perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ kali 100%.

Pengadaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1.738 buah, sementara target sampai dengan tahun 2026 sebanyak 2.000 buah, maka diperoleh perhitungan realisasi indikator persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 33 Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Terpasang

Indikator	Jumlah s/d 2022	Jumlah s/d 2023	Jumlah 2024	Kebutuhan s/d 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang	1.650 buah	1.650 buah	78 unit	2.000 buah
Realisasi rambu lalu lintas yang terpasang $((1.738/2.000) \times 100\% = 86\%)$				86%

Dari data tersebut di atas selanjutnya dihitung capaian kinerja perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, rumusan sebagai berikut:

Tabel II. 34 Capaian Kinerja Perlengkapan Jalan Dan Fasilitas Pendukung LLAJ

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Katagori Capaian
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)
Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung LLAJ	85%	86%	101%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ adalah sebesar 101%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Berikut ini disajikan realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ selama tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 35 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	CK	Realisasi	CK	Realiasi	CK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	80%	100%	100%	100%	86%	101%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 realisasi persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ adalah sebesar 101%, untuk Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir yaitu pada tahun 2023 sebesar 100%, sehingga terjadi kenaikan sebesar 1%, sementara pada tahun 2022 sebanyak 80%.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Perbandingan persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ tahun 2024 dengan target Renstra, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 36 Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	86%	85%

Perbandingan realisasi capaian persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan nilai “86%” dengan realisasi kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Renstra yaitu dengan nilai “85%”.

d. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ tahun 2023 dengan Standar Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 37 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	86%	-

Realisasi capaian indikator kinerja persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023 diperoleh nilai “86%” , sedangkan dari standar nasional tidak ditemukan.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja sasaran: “Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ”, antara lain disebabkan oleh:

- 1). Belum tersedianya hasil kajian terkait dengan kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas yang harus disediakan;
- 2). Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengelolaan jalan sesuai dengan kewenangannya masing- masing;
- 3). Terbatasnya pegawai yang memiliki kompetensi dalam menghitung dan menganalisa kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas yang harus disediakan, maupun yang bertugas di lapangan;
- 4). Kewenangan pengelolaan jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, hanya pada jalan kota, sementara jalan provinsi dan jalan nasional berada pada instansi lain padahal pada jalan tersebut saling terkoneksi, sehingga menjadi terbatas dan memerlukan koordinasi yang berlanjut; dan

- 5). Penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas yang belum optimal.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator sasaran: “Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ”, adalah sebagai berikut:

- 1). Penerapan hasil pengkajian akan kebutuhan perlengkapan jalan sesuai dengan ruas jalan yang terus berkembang;
- 2). Memberikan diklat kepada SDM Dinas Perhubungan terkait teknis yang berhubungan dengan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 3). Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan jalan yang melintasi Kota Banjarbaru baik jalan Nasional maupun Provinsi;
- 4). Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait akan kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas seiring dengan pertambahan jalan baru;
- 5). Mengadakan perlengkapan jalan dan fasilitas yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas pemenuhannya; dan
- 6). Mengajak masyarakat untuk turut menjaga dan memelihara keberadaan berbagai perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara ketat dan tepat guna dalam rangka penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ. Diperoleh perhitungan efisiensi sebagai berikut:

Tabel II. 38 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	887.334.225	302.254.600
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.416.463.000	254.883.575
Jumlah	2.303.797.225	557.138.175
Persentasi serapan anggaran		24,18%
Persentasi capaian kinerja		100%
Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)		75,82%

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam rangka penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ sebesar 75,82%. Tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pergeseran anggaran, tahun yang akan datang akan dilakukan monitoring secara berkala atas serapan anggaran dan dilakukan refocusing bila terjadi sisa anggaran lebih.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

7. SASARAN KE-4 INDIKATOR KINERJA KE-4

- Sasaran : Meningkatnya pengendalian kecelakaan dan kemacetan lalu lintas
- Uraian Indikator : Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi

Pencapaian sasaran ke-4 indikator kinerja ke-4 yaitu: ***“Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar”***, dengan indikator: ***Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi***, penetapan indikator tersebut terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang perhubungan, dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk keperluan berlalu lintas, sehingga tidak ada yang harus diutamakan kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, kendaraan yang digunakan untuk keperluan tertentu mendapat prioritas menggunakan jalan untuk lalu lintas. Dalam Pasal 65 ayat 1 disebutkan, pengguna jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
- e. Iring-iringan pengantar jenazah;
- f. Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
- g. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus.

Berdasarkan ayat 2 Pasal 65 PP Nomor 43 Tahun 1993, kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dengan pengawalan oleh petugas berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain. Ayat 3 menegaskan bahwa petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan yang diprioritaskan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, yang menyebutkan bahwa pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas apabila telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.

Oleh karena itu diperlukannya rekayasa lalu lintas agar terciptanya arus lalu lintas yang lancar. Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dihitung berdasarkan nilai realisasi titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dibagi target titik kemacetan lalu lintas yang teratasi kali 100%.

Sementara itu realisasi titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dihitung berdasarkan jumlah titik kemacetan lalu lintas yang teratasi di Kota Banjarbaru pada tahun 2023 meliputi titik-titik yang selama ini baik berdasarkan kajian dan pemantauan langsung di lapangan serta koordinasi yang telah dilakukan bersama instansi terkait, dengan lokasi sebagai berikut:

Tabel II. 39 Titik Kemacetan Lalu Lintas Yang Teratasi

No.	Lokasi	2024
(1)	(2)	(3)
1.	Bundaran Amaco	1
2.	Simpang 3 Brimob Banjarbaru (Jalan Ahmad Yani Km 31 Banjarbaru)	1
3.	Lampu Merah RO Ulin (Jalan Ahmad Yani Km 33 Banjarbaru)	1
4.	Depan KFC Banjarbaru	1
5.	Bundara Simpang Empat Banjarbaru	1
6.	Q Mall Banjarbaru	1
Realisasi jumlah titik kemacetan lalu lintas yang teratasi		6

Target jumlah titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	6
Persentase Realisasi	100%

Sumber : Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Tahun 2023

Penilaian dapat di atasinya kemacetan pada lokasi titik kemacetan tersebut atas dasar terurainya arus lalu lintas yang semula terdapat tundaan kendaraan atau kemacetan pada periode waktu tertentu. Atas penilaian tersebut selanjutnya dihitung nilai persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi, sebagai berikut:

Tabel II. 40 Capaian Kinerja Titik Kemacetan Lalu Lintas Yang Teratasi

Indikator	Realisasi	Target	Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi adalah sebesar 100% terhadap 6 titik lokasi kemacetan yang ada di Kota Banjarbaru. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian: **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Berikut ini disajikan realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi selama tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 41 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	CK	Realisasi	CK	Realisasi	CK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dapat dilihat bahwa realisasi persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi selama 3 tahun ini yaitu capaiannya 100%. Tetapi tetap diperlukannya pembenahan dan penguatan terhadap manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan di Kota Banjarbaru. Selain itu juga dilakukan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dalam pengaturan lalu lintas di jalan raya sehingga jumlah titik kemacetan dapat teratasi setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam mengatasi titik kemacetan lalu lintas di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun selalu dapat diatasi, terutama pada hari-hari besar keagamaan, tahun dan adanya kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak pihak seperti haul akbar, namun juga kemacetan dapat terjadi karena adanya penyempitan jalan karena adanya pekerjaan perbaikan maupun pelebaran jalan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan terus melakukan koordinasi dan kerjasama semua pihak terkait dengan kelancaran dan ketertiban di jalan.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Perbandingan persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi tahun 2023 dengan target Renstra, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 42 Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%

Perbandingan realisasi capaian persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan nilai “100%” dengan realisasi kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Renstra yaitu dengan nilai “100%”.

d. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi tahun 2024 dengan Standar Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 43 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	-

Realisasi capaian indikator kinerja persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023 diperoleh nilai “100%” , sedangkan dari standar nasional tidak ditemukan.

e. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator kinerja sasaran: “Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi”, antara lain disebabkan oleh:

- 1). Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat dilaksanakan dengan baik;
- 2). Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan sehingga tugas di lapangan dapat dilakukan dengan baik;
- 3). Meningkatnya kerjasama dengan semua pihak terkait, terutama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam pengaturan lalu lintas di jalan; dan
- 4). Sudah terjalinnya kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya terutama terkait dengan agenda kerja pimpinan daerah, sehingga tugas-tugas yang terkait dengan pengawalan kepala daerah dapat dilakukan dengan baik.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator sasaran: “Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi”, adalah sebagai berikut:

- 1). Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas- tugas pengaturan lalu lintas;
- 2). Penyediaan sarana dan prasarana pengaturan lalu lintas dan pengawalan secara bertahap;
- 3). Peningkatan kerjasama dengan semua pihak terkait, yang selama ini sudah berjalan dan berjalan baik, sehingga kemacetan yang kadang-kadang terjadi di luar perhitungan dapat diatasi secara cepat;
- 4). Pemberdayaan Forum Lalu Lintas Kota Banjarbaru sebagai wadah untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Banjarbaru secara bersama-sama; dan
- 5). Mengajak masyarakat untuk tertib dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang terpasang.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dengan tepat guna dalam rangka mencegah dan mengatasi titik kemacetan lalu lintas yang teratasi. Diperoleh perhitungan

efisiensi sebagai berikut:

Tabel II. 44 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	340.209.600	314.739.480
Jumlah	340.209.600	314.739.480
Persentasi serapan anggaran		92,51%
Persentasi capaian kinerja		100%
Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)		7,49%

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka mewujudkan, mencegah dan mengatasi titik kemacetan lalu lintas sebesar **7,49%**. Tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pergeseran anggaran, tahun yang akan datang akan dilakukan monitoring secara berkala atas serapan anggaran dan dilakukan refocusing bila terjadi sisa anggaran lebih.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

8. SASARAN KE-4 INDIKATOR KINERJA KE-5

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar
- Uraian Indikator : Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas

Pencapaian sasaran ke-4 indikator kinerja ke-5 yaitu:

“Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar”, dengan indikator : ***Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas.***

Penetapan indikator tersebut terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Ayat 2 tentang

kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengujian. Peraturan lain mengenai uji kir juga tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133/2015. Salah satu yang diatur adalah terkait dengan sanksi yang dikenakan bila tidak dilakukan. Hal mengenai sanksi sudah diatur dalam UU LLAJ Pasal 76 Ayat 1 yaitu:

- Peringatan tertulis;
- Membayar sejumlah denda;
- Pembekuan izin operasi; dan
- Pencabutan izin operasi.

Pada umumnya kendaraan yang wajib mengikuti uji kir adalah kendaraan berplat kuning atau kendaraan yang dialihfungsikan menjadi kendaraan berpenumpang. Berikut ini beberapa kendaraan yang wajib mengikuti uji kir,yaitu:

- Taxi;
- Mobil yang disewakan;
- Mobil berpenumpang termasuk mobil untuk ojek online atau travel;
- Mobil pengangkut barang;
- Bus;
- Truk dan sejenisnya; serta
- Mobil pick up.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas dihitung berdasarkan nilai realisasi jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas dibagi target jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas dikali 100%. Berdasarkan data pada UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor (UPT.PPKB), bahwa jumlah Kendaraan yang di Uji pada tahun 2024 sebanyak 3.603 unit, sementara jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 5.365 unit. Data tersebut diperoleh dari hasil rekapan UPT.PPKB, berikut disajikan data Kendaraan yang di Uji dan jumlah kendaraan wajib uji:

Tabel II. 45 Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji

No.	Bulan	Kendaraan yang diuji	Kendaraan Wajib Uji
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Januari	529	542
2	Februari	298	490
3	Maret	406	649
4	April	132	320
5	Mei	383	425
6	Juni	238	669
7	Juli	366	417
8	Agustus	255	310
9	September	248	552
10	Oktober	286	336
11	November	268	295
12	Desember	194	360
Jumlah		3.603	5.365
Persentase Realisasi			67%

Dari data tersebut di atas selanjutnya dihitung nilai jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas, rumusan tersebut sebagai berikut:

Tabel II. 46 Capaian Kinerja Kendaraan Angkutan yang Lulus Uji

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Katagori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
y				
Persentase jumlah kendaraan angkutan lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	30%	67%	223%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas adalah sebesar 223%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Berikut ini disajikan realisasi persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas selama tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 47 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
		Realisasi	CK	Realisasi	CK	Realiasi	CK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	N/A	0	300%	304%	67%	223%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat realisasi persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas sebesar 223%, perbandingan dengan persentase 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023 sebesar 300% dan pada tahun 2022 belum ada perhitungan yang dimaksud, sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Perbandingan persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas tahun 2024 dengan target Renstra, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 48 Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	67%	30%

Perbandingan realisasi capaian persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan nilai “67%” dengan realisasi kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Renstra yaitu dengan nilai “30%”.

d. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas tahun 2024 dengan Standar Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 49 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	67%	-

Realisasi capaian indikator kinerja persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 diperoleh nilai “67%” , sedangkan dari standar nasional tidak ditemukan.

e. Analisis keberhasilan/kegagalan

Penyebab keberhasilan capaian pada indikator kinerja: “persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas”, antara lain disebabkan oleh:

- 1) Akreditasi yang dimiliki oleh UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor (UPT.PPKB) Kota Banjarbaru adalah tipe B sehingga pengujian berjalan maksimal;
- 2) Adanya kebijakan dari buku ke kartu uji dan perubahan besaran biaya uji yang didukung oleh pimpinan dan berbagai pihak terkait;
- 3) Melakukan peningkatan sosialisasi terhadap pentingnya pelaksanaan uji KIR bagi angkutan umum dan angkutan barang; dan
- 4) Meningkatkan keahlian dan kompetensi para tenaga penguji kendaraan bermotor.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator kinerja: “Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas”, adalah sebagai berikut:

- 1). Melakukan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana pengujian secara berkala;
- 2). Menerapkan sistem layanan berbasis teknologi sehingga layanan dapat

dilakukan secara non tunai sehingga meningkatkan transparansi pembayaran;

- 3). Menyediakan sarana dan prasarana aduan dari masyarakat terhadap pelayanan uji KIR yang dilaksanakan untuk dievaluasi dan dilakukan perbaikan; dan
- 4). Melakukan pemberian diklat teknis terkait pengujian dan perbengkelan kendaraan bermotor.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara tepat guna dalam rangka persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas sebagai berikut:

Tabel II. 50 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Pengujian Berkala Kendaraan	625.544.000	483.175.162
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	211.070.000	175.530.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	105.520.000	42.000.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	124.016.000	109.770.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	152.408.000	137.980.000
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24.180.000	7.055.162
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.350.000	840.000
Jumlah	625.544.000	483.175.162
Persentase serapan anggaran		77,24%
Persentase capaian kinerja		223%
Efisiensi anggaran (Persentase capaian kinerja - Persentase serapan anggaran)		145,76%

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka persentase jumlah

kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas sebesar **223%**. Tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pergeseran anggaran, tahun yang akan datang akan dilakukan monitoring secara berkala atas serapan anggaran dan dilakukan refocusing bila terjadi sisa anggaran lebih.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

9. SASARAN KE-4 INDIKATOR KINERJA KE-6

- Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar.
- Uraian Indikator : Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan.

Pencapaian sasaran ke-4 indikator kinerja ke-6 yaitu : ***“Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar”***, dengan indikator : **Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.**

Penetapan indikator tersebut terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang perhubungan sebagaimana di atur pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya terdapat 16 item yang terkait dengan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti parkir, penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, serta fasilitas pendukungnya. Berikut ini akan dijelaskan terkait pentingnya sasaran ke-4 sesuai dengan indikator kinerja: **Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan.**

Guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengendara bermotor dalam memarkirkan kendaraannya untuk berbagai keperluan seperti untuk berbelanja dan berolahraga serta berbagai keperluan lainnya, selain itu juga untuk pengaturan lalu lintas jalan bagi pengguna lainnya sehingga arus lalu lintas tetap lancar, maka diperlukan pengaturan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perparkiran, tentunya perlu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Kota Banjarbaru perlu dilakukan secara terencana dan terpadu. Oleh karena itu pentingnya tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan bidang perhubungan. Selanjutnya dapat dijelaskan capaian indikator kinerja persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator kinerja persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dihitung berdasarkan nilai realisasi penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dibagi target penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dikali 100%.

Sementara itu realisasi penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir didasarkan kepada jumlah izin penyelenggaraan pengelolaan parkir pada tahun 2024 yang meliputi Tempat Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP). Sedangkan untuk target izin penyelenggaraan pengelolaan parkir pada tahun 2024 sebanyak 78 lokasi/titik parkir, berikut disajikan data penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, yaitu:

Tabel II. 51 Penerbitan Izin Parkir

No.	Lokasi	2023
(1)	(2)	(3)
1.	Pengelolaan tempat parkir tepi jalan umum (TJU) yang berizin;	78
2.	Pengelolaan tempat khusus parkir (TKP) yang berizin;	2
Realisasi jumlah lokasi pengelolaan parkir yang berizin		80
Target jumlah lokasi pengelolaan parkir yang berizin		80
Persentase Realisasi		100%

Sumber : UPT Pengelolaan Perparkiran Tahun 2023

Dari data tersebut di atas selanjutnya dihitung nilai Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan, rumusan sebagai berikut:

Tabel II. 52 Capaian Kinerja Penerbitan Izin Parkir

Indikator	Target	Realisasi	Kinerja	Katagori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan adalah sebesar 100%. Hal tersebut berarti capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian: **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Berikut ini disajikan realisasi Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan selama tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 53 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Realisasi	CK	Realisasi	CK	Realisasi	CK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 terdapat realisasi Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan sebesar 100%, perbandingan dengan persentase 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar 100% maka, dapat dilihat bahwa kinerja tahun 2024 sebanding dengan tahun 2023 dan tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

Perbandingan Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan tahun 2023 dengan target Renstra, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 54 Perbandingan Realisasi Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%

Perbandingan realisasi capaian Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan nilai “100%” dengan realisasi kinerja predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Renstra yaitu dengan nilai “100%”.

d. Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan tahun 2024 dengan Standar Nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 55 Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Tugas	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	-

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023 diperoleh nilai “100%” , sedangkan dari standar nasional tidak ditemukan.

e. Analisis keberhasilan/kegagalan

Penyebab keberhasilan/kegagalan capaian pada indikator kinerja: “Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir”, antara lain:

- 1) Telah dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir secara terjadwal;
- 2) Melaksanakan penertiban pada juru parkir liar yang tidak pada tempatnya; dan
- 3) Manajemen pengelolaan parkir yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Langkah selanjutnya yang diperlukan di masa yang akan datang, pada indikator kinerja: “Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir”, adalah sebagai berikut:

- 1). Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- 2). Memberikan pendidikan khusus (diklat) kepada para juru parkir;

- 3). Melengkapi perlengkapan atau atribut terkait pengelolaan parkir;
- 4). Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan pengelolaan ataupun manajemen parkir; dan
- 5). Melakukan sosialisasi terkait kawasan dilarang parkir dan tarif retribusi parkir serta tata cara pembayarannya.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara tepat guna dalam rangka meningkatnya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sebagai berikut:

Tabel II. 56 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.993.899.500	1.717.142.433
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	698.361.000	512.746.550
Jumlah	2.692.260.500	2.229.888.983
Persentasi serapan anggaran		82,83%
Persentasi capaian kinerja		100%
Efisiensi anggaran (Persentasi capaian kinerja- Persentasi serapan anggaran)		17,17%

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sebesar 17,17%. Tidak dilakukan refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan waktu pergeseran anggaran, tahun yang akan datang akan dilakukan monitoring secara berkala atas serapan anggaran dan dilakukan refocusing bila terjadi sisa anggaran lebih. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Selanjutnya dapat dijelaskan pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sampai dengan tahun tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.57. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasai Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	22.473.450	0,00%	-	100%	22.473.450	98,46%	22.126.950	98,46%	22.126.950	98,46%	98,46%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Capaian Kinerja	100%	21.500.000	0,00%	-	100%	21.500.000	90,52%	19.462.400	90,52%	19.462.400	90,52%	90,52%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Belanja Gaji dan Tunjangan	100%	4.014.696.240	0,00%	-	100%	4.014.696.240	94,59%	3.797.637.359	94,59%	3.797.637.359	94,59%	94,59%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Tahun SKPD	100%	43.275.000	0,00%	-	100%	43.275.000	94,40%	40.853.500	94,40%	40.853.500	94,40%	94,40%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Persentase dokumen Laporan Manajemen Aset/Barang	100%	15.000.000	0,00%	-	100%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	100,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tersedianya pakaian dinas pegawai	100%	150.360.000	0,00%	-	100%	150.360.000	98,92%	148.730.000	98,92%	148.730.000	98,92%	98,92%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	9.999.544	0,00%	-	100%	9.999.544	100,00%	9.999.254	100,00%	9.999.254	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	131.225.000	0,00%	-	100%	131.225.000	86,66%	113.720.500	86,66%	113.720.500	86,66%	86,66%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	21.000.000	0,00%	-	100%	21.000.000	100,00%	21.000.000	100,00%	21.000.000	100,00%	100,00%

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasai Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	14.400.000	0,00%	-	100%	14.400.000	100,00%	14.400.000	100,00%	14.400.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	149.996.000	0,00%	-	100%	149.996.000	97,73%	146.589.751	97,73%	146.589.751	97,73%	97,73%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	122.060.000	0,00%	-	100%	122.060.000	99,50%	121.450.000	99,50%	121.450.000	99,50%	99,50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	116.700.000	0,00%	-	100%	116.700.000	57,97%	67.645.783	57,97%	67.645.783	57,97%	57,97%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	25.200.000	0,00%	-	100%	25.200.000	100,00%	25.200.000	100,00%	25.200.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	38.492.000	0,00%	-	100%	38.492.000	65,62%	25.258.800	65,62%	25.258.800	65,62%	65,62%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	285.958.000	0,00%	-	100%	285.958.000	77,74%	222.315.300	77,74%	222.315.300	77,74%	77,74%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	14.000.000	0,00%	-	100%	14.000.000	49,31%	6.903.500	49,31%	6.903.500	49,31%	49,31%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	201.590.000	0,00%	-	100%	201.590.000	98,84%	199.255.000	98,84%	199.255.000	98,84%	98,84%

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasai Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	27.000.000	0,00%	-	100%	27.000.000	95,91%	25.896.000	95,91%	25.896.000	95,91%	95,91%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	245.098.750	0,00%	-	100%	245.098.750	97,97%	240.123.750	97,97%	240.123.750	97,97%	97,97%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	100%	399.980.000	0,00%	-	100%	399.980.000	94,58%	378.310.000	94,58%	378.310.000	94,58%	94,58%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	120.000.000	0,00%	-	100%	120.000.000	78,35%	94.021.000	78,35%	94.021.000	78,35%	78,35%
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	2.015.448.250	0,00%	-	100%	2.015.448.250	36,70%	739.659.750	36,70%	739.659.750	36,70%	36,70%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	260.000.000	0,00%	-	100%	260.000.000	82,69%	214.989.000	82,69%	214.989.000	82,69%	82,69%

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasai Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.508.996.700	0,00%	-	100%	5.508.996.700	65,35%	3.600.368.300	65,35%	3.600.368.300	65,35%	65,35%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tersedianya pakaian dinas pegawai	100%	46.460.000	0,00%	-	100%	46.460.000	97,37%	45.240.000	97,37%	45.240.000	97,37%	97,37%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	3.430.680	0,00%	-	100%	3.430.680	99,47%	3.412.500	99,47%	3.412.500	99,47%	99,47%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	29.677.000	0,00%	-	100%	29.677.000	79,88%	23.707.000	79,88%	23.707.000	79,88%	79,88%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	210.750.000	0,00%	-	100%	210.750.000	46,25%	97.472.500	46,25%	97.472.500	46,25%	46,25%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100%	2.097.000	0,00%	-	100%	2.097.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	83.510.000	0,00%	-	100%	83.510.000	31,36%	26.189.605	31,36%	26.189.605	31,36%	31,36%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	974.800.000	0,00%	-	100%	974.800.000	91,08%	887.853.000	91,08%	887.853.000	91,08%	91,08%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	275.960.000	0,00%	-	100%	275.960.000	98,74%	272.492.000	98,74%	272.492.000	98,74%	98,74%

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasai Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	138.200.000	0,00%	-	100%	138.200.000	21,41%	29.584.776	21,41%	29.584.776	21,41%	21,41%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	8.400.000	0,00%	-	100%	8.400.000	100,00%	8.400.000	100,00%	8.400.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	89.160.000	0,00%	-	100%	89.160.000	83,98%	74.881.000	83,98%	74.881.000	83,98%	83,98%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	2.950.000	0,00%	-	100%	2.950.000	59,32%	1.750.000	59,32%	1.750.000	59,32%	59,32%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	33.773.500	0,00%	-	100%	33.773.500	89,71%	30.298.500	89,71%	30.298.500	89,71%	89,71%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	19.175.000	0,00%	-	100%	19.175.000	40,65%	7.795.000	40,65%	7.795.000	40,65%	40,65%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	6.000.000	0,00%	-	100%	6.000.000	67,38%	4.042.508	67,38%	4.042.508	67,38%	67,38%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	23.607.530	0,00%	-	100%	23.607.530	99,71%	23.538.500	99,71%	23.538.500	99,71%	99,71%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	8.400.000	0,00%	-	100%	8.400.000	100%	8.400.000	100,00%	8.400.000	100,00%	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	7.600.000	0,00%	-	100%	7.600.000	93,95%	7.140.000	93,95%	7.140.000	93,95%	93,95%

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasai Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	6.000.000	0,00%	-	100%	6.000.000	97,00%	5.820.000	97,00%	5.820.000	97,00%	97,00%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	1.094.322.000	0,00%	-	100%	1.094.322.000	89,79%	982.622.000	89,79%	982.622.000	89,79%	89,79%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasiitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasiitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	456.586.500	0,00%	-	100%	456.586.500	70,41%	321.496.500	70,41%	321.496.500	70,41%	70,41%

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Dari 2 (sepuluh) program yang dilaksanakan pada tahun 2024, pada umum dapat terlaksana dan hampir mencapai target;
2. Dari 21 Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, pada umum dapat terlaksana dan hampir mencapai target;
3. Dari 52 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, pada umum dapat terlaksana dan hampir mencapai target;
4. Secara umum seluruh kegiatan di tahun 2024 dapat tertaksana dengan baik.

C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, tugas dan fungsinya dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekaligus sebagai tolak ukur kinerja pembangunan di bidang perhubungan yang diharapkan mampu menjalani tantangan kedepan.

Perencanaan yang akurat, realistis, aplikatif, mantap dan matang, disusun menurut sistem monitoring yang efektif dalam usaha menunjang pembangunan Daerah. Dengan demikian segala usaha dioptimalkan untuk menggali potensi yang ada di dalam dan di luar organisasi dan harapan kedepan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru semakin inovasi, kemajuan, juga kualitas.

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi organisasi selama tahun berjalan hingga tahunan anggaran berakhir, untuk itu dilakukan perhitungan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.58. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023
(Renstra 2021-2026)**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	A	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Dan Angkutan Pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	53%	104%	208%	Sangat Baik
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas, Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Yang Memenuhi Standar	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	38%	39%	108%	Sangat Baik
	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	90%	121%	139%	Sangat Baik
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	90%	86%	101%	Sangat Baik
	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	30%	67%	223%	Sangat Baik
	Persentase tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Baik

Tabel II.59. Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	REALISASI PER 30062024 (Rp)
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	18.616.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	258.120.000	114.850.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.704.046	3.275.059.007
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	10.578.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.000	6.745.000
Total	5.078.824.046	3.425.848.507
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.100.000	1.096.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	276.504.000	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.871.500	15.976.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.210.000	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	215.134.000	86.850.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.999.800	13.853.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.998.000	1.998.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.297.000	127.475.603

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.760.000	-
Pengadaan Mebel	43.553.800	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.108.700	182.468.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.991.680	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.500.000	82.526.416
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.042.500	92.702.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.990.500	11.920.150
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338.846.600	119.063.061
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.690.000	22.260.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	-
Total	2.387.598.080	758.190.330
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.344.148.620	4.169.247.650
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.167.071.500	507.415.700
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.189.223.200	370.151.300
Total	9.700.443.320	5.046.814.650
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	128.608.000	36.577.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	125.370.150	-
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6.000.000	-

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.278.466.100	1.543.309.832
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	39.993.400	-
Total	5.578.437.650	1.579.886.832
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.474.817.700	780.937.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	138.780.000	68.295.000
Total	1.613.597.700	849.232.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	377.440.000	118.375.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	123.900.000	51.950.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.540.000	10.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	-
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.308.000	1.934.200
Total	620.188.000	182.259.200
GRAND TOTAL	24.979.088.796	11.842.232.019

Tabel II.60. Capaian Program Pembangunan Prioritas Daerah Yang Sesuai RPJMD Perubahan (RPJMD 2021-2026)
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan													
				2021		2022		2023		2024		2025		20226		Kondisi Akhir	
				Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real.	Target	Real
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)
VISI : TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER																	
MISI 1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan ber berakhlak mulia																	
Tujuan 1.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia																	
Sasaran 1.1.5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat																	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase beroerasinya angkutan yang aman, nyaman, tertib dan lancar	%	80	80	80	80	80	85	85	90	90	95	95	95	95	95	95
MISI 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan																	
Tujuan 2.1. Meningkatnya kualitas, kapasitas lingkungan dan infrastruktur perkotaan																	
Sasaran 2.2.2. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah																	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum diterminal	%	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	95	95	95	95
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan Penyebab kemacetan Lalu Lintas yangb Teratasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel II.61. Capaian Program Pembangunan Prioritas Daerah Yang Sesuai RPJMD Perubahan (RPJMD 2021-2026)
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan/ Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
URUSAN PERHUBUNGAN		CAPAIAN URUSAN	100%	95%		
Dinas Perhubungan	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	45%	32,3%		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota	30 Unit	30 Unit	Terbatasnya armada yang disediakan	Secara bertahap untuk pembaharuan armada
	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	32%	30%		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota	6 Unit	6 Unit		
	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	83%	76%		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	100%		
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%		
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	80%	80%		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%		
	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100%	100%		
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%		
	Persentase tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100%	100%		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%		

Sebagaimana data dari Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 tersebut di atas tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan anggaran, namun selain itu Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru juga memiliki pendapatan dalam bentuk retribusi sebagaimana yang termuat dalam beberapa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, berikut ini disajikan Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah tersaji sebagai berikut:

Tabel II.62.
Struktur Pendapatan Dan Belanja Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023
PENDAPATAN	3.120.500.000,00	2.738.117.732,00	1.778.877.419,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.120.500.000,00	2.738.117.732,00	1.778.877.419,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.120.500.000,00	2.730.866.586,00	1.777.934.919,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	7.251.146,00	942.500,00
BELANJA	20.023.140.395,00	15.235.623.247,00	12.034.173.212,00
BELANJA OPERASI	16.245.099.020,00	12.640.616.147,00	10.725.293.831,00
Belanja Pegawai	4.304.549.950,00	4.215.002.639,00	4.136.647.599,00
Belanja Barang	11.940.549.070,00	8.425.613.508,00	6.588.646.232,00
BELANJA MODAL	3.778.041.375,00	2.595.007.100,00	1.308.879.381,00
Belanja Peralatan dan Mesin	3.307.201.375,00	2.179.371.900,00	270.564.000,00
Belanja Bangunan dan Gedung	420.160.000,00	415.635.200,00	705.378.491,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	50.680.000,00	0	332.936.890,00

1. Pendapatan

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran pendapattran secara umum sebesar Rp. 3.120.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.738.117.732 dengan capaian sebesar 87,75 dengan rincian sebagai berikut :

- Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dengan realisasi sebesar 62,02%;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan realisasi sebesar 68,17%;
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar 237,65%;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan realisasi sebesar 106,43%;

- e. Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan dengan realisasi sebesar 34,21%.

2. BELANJA

Untuk belanja terdiri dari belanja operasi sebesar 16.245.099.020,00 dengan realisasi sebesar 12.640.616.147,00 dan belanja modal sebesar 3.778.041.375,00 dengan realisasi sebesar 2.595.007.100,00 sehingga total belanja sebesar 20.023.140.395,00 dengan realisasi anggaran sebesar 15.235.623.247,00 atau 76,09% dengan uraian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dengan realisasi 77,81%.

b. Belanja Modal

Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan Gedung, dan belanja asset lainnya dengan realisasi sebesar 68,69%, adanya sisa anggaran tersebut disebabkan oleh adanya efisiensi dan beberapa kegiatan yang belum didukung oleh kondisi kondisi lapangan serta regulasi yang masih dalam proses dan beberapahal teknis yang membuat kegiatan tersebut menyisakan anggaran dari yang ditetapkan.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel II.63.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Hingga Tahun 2024

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Proyeksi						AC
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik		100%	%	75	80	85	90	95	100	75	80	85	90	80	80	100	100	100	100	80	80	
	a	Jumlah fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	27 buah	Buah	17	19	21	23	25	27	17	19	21	23	25	25	100	100	100	100	100	100	
	b	Terpeliharanya rambu lalu lintas dan lampu peringatan	24 rambu	Rambu	14	16	18	20	22	24	14	16	18	20	20	20	100	100	100	100	100	100	
	c	Jumlah halte/shelter yang terpelihara	3 buah	Buah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal		80%	%	70	70	75	75	80	80	70	70	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	
	a	Jumlah armada angkutan umum yang memanfaatkan prasarana dan fasilitas di terminal	50 armada	armada																			
	b	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	30 kali	kali	5	10	15	20	25	30	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
	c	Pengawasan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lebaran	12 kali	kali	12	12	12	12	12	12	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100	
	d	Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi		100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	a	Jumlah titik pantau (jalan nasional, jalan	6 titik pantau	Titik pantau	4	4	5	6	6	6	4	4	5	6	6	6	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Proyeksi						AC
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		provinsi, jalan kabupaten)																					
	b	Tersedianya ranbu-rambu lalu lintas	106 buah	Buah						106						106							100
	c	Terpasang lampu peringatan jalan	1 buah	buah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
	d	Terlaksananya pengamanan lalulintas jalan dan pengawalan pejabat daerah	12 bulan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	
	e	Jumlah marka jalan	1.500 meter	meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase beroperasi angkutan yang aman dan nyaman		80%	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100	100	100	100	100	100	
	a	Jumlah pelajar yang memanfaatkan angkutan gratis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	b	Load factor angkutan umum	25%	%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100	100	100	
	c	Pemilihan dan pemberian penghargaan pelajar pelopor Keselamatan LLAJ	1 Kegiatan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
	d	Jumlah operasional angkutan pelajar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	e	Jumlah armada angkutan pelajar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Persentase Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan		85%	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100	
	a	Jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji	6.000 buah	Buah																			
	b	Pengawasan dan pembinaan kendaraan wajib uji	12 bulan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	
	c	Pendataan dan pembinaan usaha perbengkelan umum	90 kali	Kali	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Proyeksi						AC
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Baik	Opini	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100	100	100	100	
	a Persentase pelayanan tugas rutin perkantoran	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	a Persentase sarana aparatur yang terpelihara dengan baik	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	a Persentase jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase tingkat kapasitas SDM aparatur	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	a Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Nilai Evaluasi AKIP	CC	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			
	a Persentase realisasi fisik dan Keuangan	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	
	b Tersedianya Rencana Strategis Dishub	1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
	c Tersedianya rencana kerja Dishub	1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
	d Tersedianya perjanjian kinerja Dishub	1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
	e Tersedianya Laporan Kinerja Dishub	1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
11	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Baik	Opini	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Proyeksi						AC
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	-	Persentase pelayanan tugas rutin perkantoran	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti		100%	%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	-	Persentase sarana aparatur yang terpelihara dengan baik	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Tingkat alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar pengujian		100%	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	-	Persentase jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		Baik	Opini	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Tertib Perparkiran Dikota Banjarbaru		100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berikut ini disajikan permasalahan yang selama ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan urusan perhubungan di daerah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Belum tercapainya standar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/MRLL, Evaluasi Analisa dampak lalu lintas/andalalin dan pengelolaan parkir;
4. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian
5. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan;
6. Penyediaan lahan parkir di beberapa titik rawan kemacetan dan kurangnya penanganan serta penertiban parkir liar (PKL, on-street parking, angkot).
7. Fasilitas pendukung transportasi (terminal dan halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
8. Belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan baik untuk pelayanan pengelolaan perparkiran maupun pelayanan Uji KIR;
9. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang belum optimal;
10. Rendahnya aksesibilitas ke angkutan umum (pola jaringan trayek angkot belum tertata membentuk spiral jalur utama memusat ke terminal utama simpang empat).
11. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

12. Belum optimalnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kota Banjarbaru.

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni :

1. Belum terpenuhinya jumlah angkutan untuk pelajar;
2. Belum tercapainya kualitas insfrastruktur kota bidang perhubungan.

E. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses yang dilakukan yaitu untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sehingga terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat pada perancangan awal RKPD, untuk perbandingan itu maka diuraikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel II.64. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kode				Indikator Kinerja				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
								Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2															
15															
2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
2															
15															
2	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2															
15															
2	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	1 Dokumen	100%	26.000.000	100%	1 Dokumen	100%	26.000.000
2															
15															
2	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	1 Laporan	100%	27.000.000	100%	1 Laporan	100%	27.000.000
2															
15															
2	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
2															
15															
2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	38 Orang	100%	4.000.000.000	100%	38 Orang	100%	4.000.000.000
2															
15															
2	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1 Laporan	100%	50.000.000	100%	1 Laporan	100%	50.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2 15	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1 Laporan	100%	20.000.000	100%	1 Laporan	100%	20.000.000
2 15	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							180.000.000				180.000.000
2 15	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	75 Paket	75 Paket	180.000.000	100%	75 Paket	75 Paket	180.000.000
2 15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							460.000.000				460.000.000
2 15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	15 Paket	100%	12.000.000	100%	15 Paket	100%	12.000.000
2 15	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	40 Paket	100%	160.000.000	100%	40 Paket	100%	160.000.000
2 15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4 Paket	100%	32.000.000	100%	4 Paket	100%	32.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2 15	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	12 Dokumen	100%	6.000.000	100%	12 Dokumen	100%	6.000.000
2 15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Semua 12 Laporan	100%	250.000.000	100%	Semua 12 Laporan	100%	250.000.000
2 15	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							150.000.000				150.000.000
2 15	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	20 Unit	100%	150.000.000	100%	20 Unit	100%	150.000.000
2 15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							168.800.000				168.800.000
2 15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12 Laporan	100%	140.000.000	100%	12 Laporan	100%	140.000.000
2 15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12 Laporan	100%	28.800.000	100%	12 Laporan	100%	28.800.000
2 15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							612.000.000				612.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2 15	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Unit	100%	50.000.000	100%	1 Unit	100%	50.000.000
2 15	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	26 Unit	100%	350.000.000	100%	26 Unit	100%	350.000.000
2 15	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20 Unit	100%	12.000.000	100%	20 Unit	100%	12.000.000
2 15	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Unit	100%	200.000.000	100%	1 Unit	100%	200.000.000
2 15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							5.940.000.000				5.940.000.000
2 15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							800.000.000				800.000.000
2 15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	150 Unit	100%	500.000.000	100%	150 Unit	100%	500.000.000
2 15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	300 Unit	100%	300,000,000	100%	300 Unit	100%	300,000,000
2 15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							510.000.000				510.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2 15	02	2,03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	100%	2 Unit	100%	350.000.000	100%	2 Unit	100%	350.000.000
2 15	02	2,03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	100%	2 Unit	100%	160.000.000	100%	2 Unit	100%	160.000.000
2 15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							350.000.000				350.000.000
2 15	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	100%	1 Laporan	100%	350.000.000	100%	1 Laporan	100%	350.000.000
2 15	02	2,09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							4.280.000.000				4.280.000.000
2 15	02	2,09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	100%	36 Unit	36 Unit	4.200.000.000	100%	36 Unit	36 Unit	4.200.000.000
2 15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	100%	1 Laporan	36 Unit	80.000.000	100%	1 Laporan	36 Unit	80.000.000
				TOTAL							11.633.800.000				11.633.800.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
15											984.200.000				984.200.000
2	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
15											188.200.000				188.200.000
2	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
15											46.500.000				46.500.000
2	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	15 Paket	15 Paket	46.500.000	100%	15 Paket	15 Paket	46.500.000
2	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										
15											68.300.000				68.300.000
2	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mewujudkan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Semua 9 Paket	100%	4.000.000	100%	Semua 9 Paket	100%	4.000.000
2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mewujudkan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	40 Paket	100%	40.000.000	100%	40 Paket	100%	40.000.000
2	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mewujudkan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4 Paket	100%	22.000.000	100%	4 Paket	100%	22.000.000
15															

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2 15	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	12 Dokumen	100%	2.300.000	100%	12 Dokumen	100%	2.300.000
2 15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							68.400.000				68.400.000
2 15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12 Laporan	100%	60.000.000	100%	12 Laporan	100%	60.000.000
2 15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12 Laporan	100%	8.400.000	100%	12 Laporan	100%	8.400.000
2 15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5.000.000				5.000.000
2 15	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Unit	100%	5.000.000	100%	1 Unit	100%	5.000.000
2 15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							796.000.000				796.000.000
2 15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							796.000.000				796.000.000
2 15	02	2,05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	2 Unit	100%	500.000.000	100%	2 Unit	100%	500.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2 15	02	2,05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Semua 7 Orang	100%	50.000.000	100%	Semua 7 Orang	100%	50.000.000
2 15	02	2,05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1 Dokumen	100%	150.000.000	100%	1 Dokumen	100%	150.000.000
2 15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1 Unit	100%	50.000.000	100%	1 Unit	100%	50.000.000
2 15	02	2,05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Semua 1 Laporan	100%	40.000.000	100%	Semua 1 Laporan	100%	40.000.000
2 15	02	2,05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lancarnya Sistem Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1 Laporan	100%	6.000.000	100%	1 Laporan	100%	6.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
				TOTAL							984.200.000				984.200.000			
2				UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN														
2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							2.044.200.000				2.044.200.000			
2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							164.200.000				164.200.000			
2	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							127.000.000				127.000.000			
2	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11 Paket	100%	6.000.000	100%	11 Paket	100%	6.000.000			
2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	30 Paket	100%	45.000.000	100%	30 Paket	100%	45.000.000			
2	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3 Paket	100%	16.000.000	100%	3 Paket	100%	16.000.000			
2	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	12 Laporan	100%	60.000.000	100%	12 Laporan	100%	60.000.000			
2	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							17.200.000				17.200.000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2 15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12 Laporan	100%	7.200.000	100%	12 Laporan	100%	7.200.000
2 15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12 Laporan	100%	10.000.000	100%	12 Laporan	100%	10.000.000
2 15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20.000.000				20.000.000
2 15	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10 Unit	100%	12.000.000	100%	10 Unit	100%	12.000.000
2 15	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6 Unit	100%	8.000.000	100%	6 Unit	100%	8.000.000
2 15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							1.880.000.000				1.880.000.000
2 15	02	2,04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							1.880.000.000				1.880.000.000
2 15	02	2,04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pembangunan Fasilitas Sistem Pelayanan Persentase Peningkatan pengelolaan parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.280.000.000	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1.280.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2 15	02	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pengelolaan parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	1 Laporan	1 Dokumen	600.000.000	100%	1 Laporan	1 Dokumen	600.000.000
TOTAL											2.044.200.000				2.044.200.000

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perubahan Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Dikaitkan dengan sasaran pada RPJMD 2021-2026 Kota Banjarbaru serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berkaitan erat dengan Misi ke-2 yaitu : **“Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”**, dengan Tujuan yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”** dan dengan Sasaran adalah **“Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas”**. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut tentunya menjadi tugas Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan jalan yaitu : **“Mewujudkan keselamatan, kenyamanan, kelancaran lalu lintas angkutan dan meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan yang terintegrasi”**.

F. Penelaahan Usutan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM,

Perguruan Tinggi dan dari SKPD lain dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota tidak memuat catatan perubahan untuk Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Tabel II.65.
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Banjarbaru

PENGUSUL	LOKASI	PERMINTAAN
Sat Brimob Polda	Jalan A. Yani Km 31 Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru	Zebra Cross
SDN 1 Loktabat Utara Banjarbaru	Jalan A.Yani KM. 32,5 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara	Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
SMP Muhamadiyah Banjarbaru	Jalan A. Yani No. 47 Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
SMPN 14 Banjarbaru	Jalan Trikora Rt. 32 Rw. 05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin	Rambu Lalu Lintas
		Traffic Light
		Pita Kejut
		Rambu Zona Sekolah
		Marka Zona Sekolah
		Zebra Cross
SMPN 9 Banjarbaru	Jalan Karang Anyar Pondok 4 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara	Rambu Lalu Lintas
		Traffic Light
		Pita Kejut
		Rambu Zona Sekolah
		Marka Zona Sekolah
		Zebra Cross
		Rambu Petunjuk
		Road Barrier Plastik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan umum nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik;
3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
4. Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar;
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi yang dibuat untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanan pengawasan penatausahaan keuangan;
2. Pelaksanan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
3. Pengembangan angkutan pelajar gratis
4. Pengembangan sistem angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana angkutan jalan;
6. Peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;
8. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran lalu lintas angkutan jalan;

Kebijakan yang dibuat untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;
2. Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan
3. Menyediakan sarana angkutan pelajar
4. Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;
5. Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;
6. Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;
7. Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;
8. Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif

dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

Tabel III.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi	55%
2	Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	40%
			Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	93%
			Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	95%
			Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%
			Persentase jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	35%
			Persentase tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan	100%

D. PROGAM DAN KEGIATAN

Progam yang dilaksanakan dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Administrasi Umum
 - d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - d. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - f. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Tabel III.2. Rumusan Rencana Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
DINAS PERHUBUNGAN							24.979.088.796,00	24.805.683.672,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							24.979.088.796,00	24.805.683.672,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							24.979.088.796,00	24.805.683.672,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.466.422.126,00	9.412.414.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							298.120.000,00	66.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan	BB Nilai 100 %	4 Dokumen	75 %	40.000.000,00	35.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan	BB Nilai 100 %	4 Laporan	75 %	258.120.000,00	31.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.780.704.046,00	4.963.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel	100 % BB Nilai	43 Orang/bulan	100 % 96 %	4.730.704.046,00	4.898.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel	100 % BB Nilai	1 Laporan	100 % 96 %	30.000.000,00	40.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel	100 % BB Nilai	4 Laporan	100 % 96 %	20.000.000,00	25.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13.100.000,00	28.100.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	1 Laporan	100 %	13.100.000,00	28.100.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							276.504.000,00	280.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.	100 %	75 Paket	93 %	276.504.000,00	280.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah							470.510.300,00	595.314.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	100 %	2 Paket	75 %	28.871.500,00	30.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	100 %	6 Paket	75 %	10.210.000,00	12.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	100 %	7 Paket	75 %	215.134.000,00	215.314.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	100 %	2 Paket	75 %	27.999.800,00	30.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	100 %	12 Dokumen	75 %	1.998.000,00	8.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	100 %	12 Laporan	75 %	186.297.000,00	300.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							569.414.180,00	2.155.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan	100 %	5 Unit	75 %	320.760.000,00	600.000.000,00
Pengadaan Mebel								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan	100 %	21 Unit	75 %	43.553.800,00	45.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan	100 %	10 Unit	75 %	196.108.700,00	1.500.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan	100 %	2 Unit	75 %	8.991.680,00	10.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							644.542.500,00	650.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	100 %	12 Laporan	75 %	250.500.000,00	300.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	100 %	12 Laporan	75 %	394.042.500,00	350.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							413.527.100,00	675.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	100 %	1 Unit	75 %	37.990.500,00	50.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	100 %	28 Unit	75 %	338.846.600,00	400.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	100 %	20 Unit	75 %	36.690.000,00	25.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	100 %	2 Unit	75 %	0,00	200.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							17.512.666.670,00	15.393.269.672,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							8.511.220.120,00	4.195.939.672,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ yang terpenuhi	90 %	150 Unit	100 %	7.344.148.620,00	2.992.270.172,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ yang terpenuhi	90 %	300 Unit	100 %	1.167.071.500,00	1.203.669.500,00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							253.978.150,00	379.152.500,00
Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C								
	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Persentase Terminal Tipe C yang dikelola	90 %	2 Unit	100 %	128.608.000,00	154.152.500,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)								
	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Persentase Terminal Tipe C yang dikelola	90 %	2 Unit	100 %	125.370.150,00	225.000.000,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							1.613.597.700,00	2.592.291.500,00

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
	Persentase tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pengelolaan parkir yang dibina	100 %	1 Dokumen	100 %	1.474.817.700,00	1.993.930.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Persentase tempat parkir yang dikelola dengan baik sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan parkir yang dibina	100 %	1 Laporan Laporan	100 %	138.780.000,00	598.361.000,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							620.188.000,00	478.724.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR	30 %	3 Orang	100 %	377.440.000,00	62.500.000,00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR	30 %	1 Dokumen	100 %	123.900.000,00	171.791.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR	30 %	17 Unit	100 %	110.540.000,00	180.952.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR	30 %	1 Laporan	100 %	0,00	55.111.000,00
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR	30 %	1 Laporan	100 %	8.308.000,00	8.370.000,00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							1.189.223.200,00	1.125.168.500,00

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								
	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	100 %	1 Laporan	100 %	1.189.223.200,00	1.125.168.500,00
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							6.000.000,00	7.000.000,00
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota								
	-	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	-	1 Laporan	-	6.000.000,00	7.000.000,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							5.318.459.500,00	6.614.993.500,00
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan	38 % 53 %	1 Laporan	100 %	39.993.400,00	89.993.500,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan	38 % 53 %	39 Unit	100 %	5.278.466.100,00	6.525.000.000,00
TOTAL							24.979.088.796,00	24.805.683.672,00

Target dari indikator kinerja sasaran yang ada di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan pada dihitung di akhir tahun dikarenakan bahan yang dipakai sebagai alat ukur baru terkumpul di akhir tahun. Pada awal tahun, kebutuhan formasi masih dalam tahap usulan ke Pemerintah Kota Banjarbaru sehingga belum bisa dipastikan angka yang dijadikan acuan. Rekap kesesuaian dalam penempatan jabatan merupakan satu kesatuan dalam perhitungan, sehingga tidak dapat dipisah-pisah untuk penghitungannya, di samping adanya kebijakan yang seringkali menyertai setiap pengambilan keputusan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah pada pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

A. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS RKPD KOTA BANJARBARU

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024, Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024, maka Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan urusan bidang perhubungan yaitu menyediakan lalu lintas angkutan jalan yang tertib, lancar, aman dan nyaman serta terpenuhinya sarana prasarana dan transportasi nyaman, tahan lama, berwawasan lingkungan merata dan berkelanjutan. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung Prioritas Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disusun menjadi Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang menjadi urusan perhubungan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.1. Program Pembangunan Prioritas Daerah Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
VISI : BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)													
MISI Ke-2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup													
Tujuan 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan													
Sasaran 5. Meningkatnya Infrastruktur kota yang berkualitas													
Strategi 1.8 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan													
Arah Kebijakan 1.8.1 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan													
DINAS PERHUBUNGAN					12.800		13.948		15.260		16.696		18.268
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survei Kepuasan Masyarakat	80%	5.881	82%	6.337	84%	6.908	86%	7.530	88%	8.206
Mewujudkan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan darat	Meningkatnya sarana transportasi yang memenuhi standart keselamatan dan kelaikan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kebutuhan transportasi yang terpenuhi	34%	6.919	36%	7.610	38%	835	40%	9.166	42%	10.061
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan	86%	285	87%	314	90%	341	93%	374	96%	407

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Meningkatnya pengendalian kemacetan lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	83%	1.171	85%	1.288	90%	1.404	95%	1.531	100%	1.668
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	278	100%	306	100%	333	100%	362	100%	396
UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR					1.898		2.088		2.263		2.400		2.545
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survei Kepuasan Masyarakat	80%	234	82%	257	84%	273	86%	291	88%	309
Mewujudkan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan darat	Meningkatnya sarana transportasi yang memenuhi standart keselamatan dan kelaikan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	25%	1.664	30%	1.830	30%	1.990	35%	2.109	35%	2.236
UPT. PENGELOLAAN PERPARKIRAN					1.987		2.030		2.233		2.456		2.701
Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survei Kepuasan Masyarakat	80%	141	82%	149	84%	164	86%	179	88%	197

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAEGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Menyelenggarakan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum dan tempat khusus parkir	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	1.845	100%	1.881	100%	2.069	100%	2.276	100%	2.504

C. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam kaitan untuk mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 diarahkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan;
2. Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan Dinas Perhubungan yang efektif, efisien dan terintegrasi;
3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan Kesekretariatan untuk menunjang dan memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan penyediaan sarana transportasi bagi pelajar dan masyarakat, pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kelancara arus jalan, mengintensifkan pendapatan PAD bidang perhubungan, dan terjaminnya kendaraan yang digunakan secara aman dan nyaman.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.2. Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2025

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
						Nasional	Daerah	
3	4	8	9	10	11	12	13	14
DINAS PERHUBUNGAN			21,291,679,001.00					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21,291,679,001.00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			21,291,679,001.00					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai	11,971,716,249.00					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningatknya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan	77 %	308,120,000.00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubunga n Kota Banjarbaru
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubunga n Kota Banjarbaru
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	258,120,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel	97 %	5,705,472,629.00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	5,645,472,629.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	25,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	13,100,000.00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								

	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13,100,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.	100 %	280,000,000.00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	280,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mewujudkan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	80 %	702,514,000.00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	20,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	315,314,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7,200,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola	Dinas Perhubungan Banjarbaru

				Semua Kel/Desa			Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan	80 %	1,370,509,620.00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	770,509,620.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-
Pengadaan Mebel								
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	200,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan	80 %	2,992,000,000.00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,692,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	80 %	600,000,000.00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	450,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	50,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	90 %	9,319,962,752.00					
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Terpenuhi	100 %	1,603,567,000.00			-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3.Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota								
	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,603,567,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3.Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	100 %	1,172,201,520.00			-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	258 Unit	740,841,020.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	258 Unit	431,360,500.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C	100 %	253,978,150.00			-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C								

	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	6 Unit	128,608,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)								
	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	8 Unit	125,370,150.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	76 %	4,135,112,000.00			-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Banjarbaru
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1,125,040,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Banjarbaru
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas								

	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	2 Unit	3,010,072,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Banjarbaru
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat	100 %	2,155,104,082.00			-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	130,000,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 Unit	2,025,104,082.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR			1,262,645,000.00					

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1,262,645,000.00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			1,262,645,000.00					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	13,447,000.00					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	80 %	13,447,000.00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13,447,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	Dinas Perhubungan Banjarbaru
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas	35 %	1,249,198,000.00					
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah kendaraan yang memenuhi standar Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR	100 % 100 %	1,249,198,000.00			-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3.Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Kota Banjarbaru
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	722,805,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Kota Banjarbaru

				Semua Kel/Desa			3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	171,340,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Kota Banjarbaru
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	140,080,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Kota Banjarbaru
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	147,952,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Kota Banjarbaru
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7 Laporan	55,111,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Kota Banjarbaru

				Semua Kel/Desa			3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	11,910,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Kota Banjarbaru
UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN			3,491,751,500.00					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3,491,751,500.00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			3,491,751,500.00					
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan	35 % 55 % 40 % 100 % 100 %	3,491,751,500.00					
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan	100 %	3,491,751,500.00			-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta	Masyarakat Banjarbaru

							Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	2,893,401,500.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	598,350,000.00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah 3. Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah Serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Masyarakat Banjarbaru
J U M L A H			26,046,075,501.00					

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, UPT dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkan Renja Perubahan Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.